



# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN

## PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENJA

TAHUN  
**2019**



## KATA PENGANTAR

---

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, telah dapat diselesaikan

Rencana Kerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah periode I1 (satu) tahun. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4).

Penyusunan Rencana Kerja ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019, sehingga target penetapan RKA/DPA- SKPD Tahun 2019 dipenuhi sesuai jadwal yang disepakati antara pihak Bupati Tanjung Jabung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, mengingat banyak kendala dan keterbatasan dalam mewujudkannya. Oleh karna itu, atas segala kekurangsempurnaan dalam penyusunan naskah ini mohon kiranya dimaafkan dan mengharapkan adanya tanggapan, saran dan umpan balik yang konstruktif, sehingga segala kekurangan dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya dapat lebih baik.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyelesaian rencana kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, anugrah dan hidayah-Nya. Akhirulkalam, mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**H. ENDANG SURYA, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650619 198512 1 001

## DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
A. Sasaran dan Capaian Indikator	12
B. Permasalahan dan Solusi	17
C. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Serta Langkah Antisipasi	18
D. Strategi Pemecahan Masalah	21
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	22
2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Kewenangan Dinas Perhubungan	22
a. Tugas Pokok Dan Fungsi	22
b. Sumber Daya Aparatur	24

c. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	25
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	25
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	27
2.6 Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan	32
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran	34
3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017	36
<b>BAB IV KESIMPULAN</b>	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Kegiatan Tahun 2017	9
Tabel 2.2 Realisasi Indikator Program Prioritas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017	11
Tabel 2.3 Capaian Indikator Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Berdasarkan RPJMD Dan Renstra	13
Tabel 2.5 Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Transportasi Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017	20
Tabel 2.6 Target Dan Realisasi PAD	22
Tabel 2.7 SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017	24
Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal Renja	29
Tabel 3.1 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019	36
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020 Sumber Dana APBN Kabupaten	37
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2019 Sumber Dana APBN Kementerian Perhubungan RI	41

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra OPD dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Renstra.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021. Tahun Anggaran 2019 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2016 - 2021, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada sub agenda pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda;
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional ( Sislognas) dan konektivitas global;
- c. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi.

Dari sub agenda nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi yang terkait langsung sektor transportasi antara lain :

- a) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
- b) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
- c) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
- d) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
- e) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
- f) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan.

Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan menjadi salah satu sub agenda prioritas nasional dengan sasaran (1) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (2) Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Jalan Perkotaan yang diukur dengan kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar minimal 20 km/jam (3) meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000M( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



- Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  14. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah penanggungjawab rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dalam kurun waktu 2017 – 2021;
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Tujuan penyusunan Renja:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2019 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

- c. Terwujudnya pencapaian visi dan misi perhubungan yang mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi kabupaten tanjung jabung barat;
- d. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan perhubungan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
- e. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- f. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- g. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### **1.1. Latar Belakang**

Menjelaskan pengertian ringkas tentang renja OPD, proses penyusunan renja OPD, keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/ L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

###### **1.2. Dasar Hukum**

Memuat tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

###### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

###### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 2016-2021

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD atau SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dianalisis disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019**

---

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021, Dinas Perhubungan memiliki visi: "Terwujudnya transportasi antar MODA yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berbasis teknologi untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat". Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang terintegritas.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan, 9 (sembilan) program, dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2017, telah disusun dengan rencana kerja Tahun 2017. Dalam perjalanannya telah dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2017 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017.

Pada akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mempedomani dan menganalisa hasil dari realisasi anggaran, penyempurnaan indikator kinerja sehingga Renstra dan IKU.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 sampai dengan tahun 2017 Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2017 telah terealisasikan sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Kegiatan Tahun 2017**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran JUMLAH TOTAL	Realisasi Keuangan	Capaian % Keuangan	Capaian % Kinerja
<b>1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran</b>					
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000	3.300.000	73,33	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	209.000.000	155.510.008	74,41	90,00
3	Penyediaan jasa jaminan milik daerah	37.200,000	30.759.065	82,69	100,00
4	Penyediaan jasa adm. Keuangan	105.820.000	97.541.250	92,18	95,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.027.476	7.773.500	96,84	95,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	50.545.200	35.029.740	69,30	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.600.000	19.950.705	57,66	95,83
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.610.100	3.565.100	77,30	100,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	4.200.000	1.380.000	32,86	100,00
11	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	211.984.860	208.592.394	98,40	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>676.487.636</b>	<b>569.401.762</b>	<b>84,17</b>	<b>100,00</b>
<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	149.200.00	146.151.400	97,96	100,00
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	81.200.000	80.815.000	99,53	100,00
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	82.000.000	50.685.000	97,47	100,00
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	452.380.000	390.145.135	98,35	100,00
16	Pemeliharaan rutin berkala/peralatan gedung kantor	128.500.000	112.908.854	87,86	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>893.280.000</b>	<b>780.705.389</b>	<b>84,17</b>	<b>100,00</b>
<b>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					

17	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	91.070.000	90.211.000	99,06	100,00
	<b>JUMLAH</b>	91.070.000	90.211.000	99,06	100,00
<b>4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan</b>					
18	Penyusunan Laporan Kegiatan Operasional	108.900.000	96.195.376	88,33	78,33
	<b>JUMLAH</b>	108.900.000	96.195.376	88,33	78,33
	<b>5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>				
19	Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Kantor Perhubungan	568.000.000	553.947.896	97,53	75,00
	<b>JUMLAH</b>	568.000.000	553.947.896	97,53	75,00
	<b>6. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ</b>				
20	Rehabilitas / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	108.000.000	105.815.914	97,98	100,00
	<b>JUMLAH</b>	108.000.000	105.815.914	97,98	100,00
	<b>7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>				
21	Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan Terminal	530.480.000	517.128.000	82,15	80,00
22	Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai dan Penyebrngan	228.000.000	227.233.920	99,66	100,00
23	Posko Ramadhan , Lebaran, Tahun Baru	158.000.000	157.715.000	97,54	100,00
24	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	212.000.000	174.150.000	82,15	60,00
25	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Dilingkungan Pelabuhan Sungai Dan Pelabuhan Penyebrangan	197.330.000	155.623.800	78,86	80
	<b>JUMLAH</b>	1.325.810.000	1.232.150.720	92,94	84,00

	<b>8. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Bermotor</b>				
26	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	125.000.000	122.195.800	97,76	100,00
27	Uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	68.000.000	62.953.000	92,58	100,00
	<b>JUMLAH</b>	193.000.000	185.148.800	95,93	100,00
	<b>9. Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas</b>				
28	Operasional Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	664.600.000	639.448.200	96,22	100,00
	<b>JUMLAH</b>	664.600.000	639.448.200	96,22	100,00
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	4.629.147.636	4.253.025.057	91,87	97,24

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tanjab Barat Tahun 2017

Prosentase penggunaan anggaran Tahun 2017 dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.629.147.636,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 4.253.025.057,00 atau sebesar 91,87 %. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 376.122.579,00 atau sebesar 8,13 % dari keseluruhan anggaran Belanja Langsung (BL) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kegiatan.

Pencapaian kinerja 2 (dua) sasaran dan pelaksanaan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Tahun 2017 dari output maupun outcome yang dihasilkan dapat mengakselerasi pencapaian indikator yang telah ditetapkan dari 2 (dua) sasaran yang ditargetkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikatakan berhasil dengan semua indikator dapat dicapai dengan memuaskan.

**Tabel 2.2** Realisasi Indikator Program Prioritas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017

No	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)	Target RPJMD Tahun 2017	Realisasi RPJMD Tahun 2017	Keterangan
1	Program Pembangunan Prasarana Dan	Meningkatnya kualitas halte dan dermaga sungai	21	13	2	5	Jumlah halte sungai yang terbangun



	Fasilitas Perhubungan	untuk kelancaran transportasi					
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ	Meningkatnya Kualitas prasarana transportasi	13	13	2	8	Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana fasilitas perhubungan yaitu halte sungai dan pelabuhan/dermaga sungai
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya jaminan pelayanan dan kenyamanan sarana angkutan	16	21	27	25	Jumlah lokasi untuk memberikan pelayanan
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan frekuensi pengendalian ketertiban lalu lintas	22	15	25	41	Jumlah pelanggaran lalu lintas dilihat dari berita acara pemeriksaan
5	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya jumlah kendaraan yang lulus uji	1.044	1.450	1.376	1.376	Jumlah unit kendaraan yang lulus uji

#### A. Sasaran dan Capaian Indikator Sasaran

Sasaran dan Indikator Sasaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dan target serta realisasinya dapat dilihat dari 2 tipe yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur Transportasi
2. Meningkatnya Layanan Pengguna Transportasi

Hasil pelaksanaan kegiatan diharapkan adalah meningkatnya kelancaran dan kenyamanan ber lalu lintas dengan terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan khususnya pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berupa Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengamanan jalan, Marka Jalan maka peningkatan fasilitas lalu lintas di jalan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan dan dalam sosialisasi pendidikan masyarakat untuk menuju tertib lalu lintas.

Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2017 yang diukur dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 sebagai berikut

Tabel 2.3  
Capaian Indikator Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran  
Berdasarkan RPJMD dan RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Pembangunan Insfratraktur Transportasi	- Tersedianya laporan kegiatan operasional	80 buku	80 buku	100
		- Jumlah Dokumen yang di susun			
		a. Tersedianya Dokumen perencanaan halte sungai	11 dokumen	11 dokumen	100
		- tersedianya fasilitas dermaga dan halte	8 unit	8 unit	100
		- pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	1 paket	1 paket	100
2.	Meningkatnya layanan pengguna transportasi	Capaian layanan pengguna transportasi			
		a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	31 unit	31 unit	100
		b. Kegiatan pengawasan, pengamanan Kawasan pelabuhan laut, sungai dan Penyebrangan	12 bulan	12 bulan	100
		c. Kegiatan Forum lalu lintas Angkutan Jalan dan keselamatan LLAJ	4 kegiatan	4 kegiatan	100
		d. Kegiatan Penciptaan keamanan dan kenyamanan Penumpang di lingkungan Terminal	12 bulan	12 bulan	100
		e. Kegiatan Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyebrangan.	12 Bulan	12 Bulan	100
		f. Kegiatan Posko pengamanan Hari - Hari besar Nasional daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
		g. Kegiatan Operasional Pengawasan, Pengendalian dan Pengamana Lalu Lintas	12 bulan	12 bulan	100
		h. Uji kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1.376 unit	1.376 unit	100





Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa berdasarkan capaian dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2017, semua sasaran yang dirumuskan tercapai walaupun belum seoptimal mungkin. Hal ini diharapkan dapat mendorong seluruh seluruh komponen

Dari 28 kegiatan dan 9 program yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan pencapaian kinerja berdasarkan realisasi dan realisasi fisik.

## **B. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang awalnya dinas perhubungan, informatika dan komunikasi menjadi dinas perhubungan, sehingga anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai) di bidang informatika dan komunikasi tidak dapat direalisasikan dan menjadi silpa, yang berpengaruh terhadap rendahnya serapan anggaran dinas perhubungan
2. Adanya selisih perhitungan antara harga barang / jasa dalam perencanaan yang tertuang dalam DPA dengan harga barang / jasa yang dibayarkan pada saat pelaksana kegiatan.
3. Adanya efisiensi di belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah di Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4. Adanya efisiensi pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Solusi dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan data dan informasi dari berbagai sumber baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Peningkatan koordinasi pelaksanaan angkutan penumpang umum, seperti kegiatan sosialisasi dan anjuran kepada pengusaha angkutan/operator
3. Pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran seefektif mungkin
4. Perlu dilaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan mengingat program E-enforcement merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan

**c. Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja Serta Langkah Antisipasi**

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerja yang mempengaruhi pembangunan maupun program kegiatan. Namun kami menyadari bahwa segala upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih baik sekecil apapun selalu mendapatkan hambatan dan pelaksanaannya tidak sesempurna sesuai dengan harapan. Dalam pencapaian Sasaran Tahun 2018, Terdapat beberapa kendala dan hambatan antara lain :

1. Peraturan di bidang Perhubungan, baik darat dan laut memerlukan kesamaan penafsiran untuk pelaksanaannya di segala tingkatan. Selain itu juga diperlukan harmonisasi peraturan perundangan bidang Perhubungan khususnya dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang kadang-kadang dilapangan menimbulkan kendala tersendiri untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah hukum di belakang hari.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah tentu memerlukan manajemen tersendiri untuk dapat menjalankan roda organisasi di Bidang/UPTD dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. diperlukan kebutuhan komposisi di Bidang Darat dan Laut juga yang memiliki kualifikasi di bidang perhubungan mengingat dua moda tersebut terdapat pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan sesuai yang ditentukan.
3. Pengalokasian Anggaran Belum Sepenuhnya Berdasarkan Pencapaian Indikator Kinerja. Kendala yang umumnya dihadapi oleh instansi adalah keterbatasan anggaran, sedangkan indikator yang harus dicapai berdasarkan RPJMD dan Renstra telah tertulis secara kuantitatif. Dengan adanya target atau angka/digit tertentu pada indikator tertentu, juga telah dapat ditentukan berapa Rupiah alokasi biaya yang diutuhkan untuk mencapainya. Namun indikator yang telah ditetapkan belum berbanding lurus dengan pengalokasian anggaran pada suatu program / kegiatan yang telah ditentukan, pada priode Rencana Tahunan yang telah disusun setiap tahunnya. Sehingga masih perlu peningkatan efektifitas dan efisien pengalokasian anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra. Hal ini memerlukan politik anggaran atau kebijakan anggaran yang kuat dari berbagai pihak setiap tahunnya, indikator mana yang akan dicapai dengan anggaran APBD yang terbatas pada setiap tahunnya. Atau kebijakan yang kuat dalam menentukan skala prioritas yang akan dicapai karena masa jabatan Bupati selama 5 (lima) tahun.

4. Pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang besar, hal ini juga dapat menjadi kendala. Biaya yang cukup besar yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, memerlukan jalan keluar yang sistematis dan terukur, baik secara peraturan maupun penganggaran. Dalam tahun 2018 pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung jabung Barat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan bidang perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, sedangkan penanganan tugas pokok sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan lainnya belum maksimal dilaksanakan, mengingat penanganan bidang perhubungan memerlukan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta semua stakeholder. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pada tahun tahun mendatang Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung jabung Barat mampu melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perhubungan dan menjadikan dinas yang dapat mendukung dalam rangka pembangunan daerah kabupaten tanjung jabung barat khususnya pembangunan di sektor perhubungan.

Adapun kendala dan hambatan yang mengemuka secara umum dalam pembangunan bidang Perhubungan antara lain adalah :

1. **Peningkatan Fasilitas Lalu Lintas jalan**

- a. Kendala dan hambatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 Menyebutkan bahwa Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, bahwa setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas Umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a) Rambu Lalu Lintas;
- b) Marka Jalan;
- c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d) Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan;
- e) Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;

- f) Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) diselenggarakan oleh :

- a) Pemerintah untuk jalan nasional;
- b) Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c) Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan;
- d) Kabupaten/kota dan jalan desa; atau

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana fasilitas lalu lintas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat fisik yaitu pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas di jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kebutuhan prasarana fasilitas lalu lintas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini terdapat pada program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas lalu Lintas Angkutan jalan (LLAJ).

Dalam program ini, terdapat permasalahan yaitu fasilitas lalu lintas jalan yang ada dan telah terpasang masih menunjukkan kekurangan-kekurangan dari sisi kuantitas. Disisi lain fasilitas lalu lintas yang terpasang merupakan barang/benda yang sangat rentan terhadap kehilangan pencurian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dilakukan adalah pihak Dinas Perhubungan akan mengusulkan secara bertahap kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan pada ruas jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya dan mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk menyempurnakan standar teknis fasilitas lalu lintas yang mempunyai nilai ekonomis rendah sehingga mengurangi resiko terjadinya pencurian. Usaha lain adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya fasilitas perhubungan untuk meningkatkan keselamatan penggunaan jalan.

**Tabel 2.5** Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Transportasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017

No	Uraian	Satuan	Kondisi Existing
1	Rambu Darat - Rambu Darat - Rambu Type F - Rambu Mini	178 unit 14 unit 13 unit	



	- RPJJ - Pagar Temporer - Warning Light - Guadrail - Deliniator	9 unit 40 unit 12 unit 2 Paket 280 buah	
2	Rambu Sungai	7 buah	

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan dan pendidikan masyarakat yang secara berkesinambungan untuk meningkatkan keselamatan penggunaan jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya untuk mengusulkan kembali pada setiap tahun anggaran untuk dapat memenuhi kekurangan-kekurangan dan memelihara fasilitas lalu lintas jalan.

## 2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

### a. Kendala dan hambatan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta untuk meningkatkan kinerja aparat dinas, tentunya fasilitas sarana dan prasarana perkantoran menjadi salah satu hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Terdapat sarana dan prasarana perkantoran yang saat ini dirasakan belum dapat mendukung dan meningkatkan (walupun tidak sampai pada tahapan menghambat) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsiserita Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya untuk mengusulkan pada tahun berikutnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kekurangan tersebut serta tetap mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dengan melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkelanjutan.

### d. Strategi Pemecahan Masalah

Dari uraian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung barat sebagaimana tersebut diatas diperlukan upaya dan strategi secara bersama untuk meningkatkan pelayanan bidang Perhubungan.

Dengan adanya kendala tersebut, maka strategi yang diterapkan dalam upaya pemecahannya adalah dengan menggunakan strategi skala prioritas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan bahwa tujuan pencapaian visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai sasaran utama masih tetap dapat pelaksana dengan sebaik-baiknya.

Selain itu diperlukan strategi terobosan yang terencana dan bertahap agar tujuan akhir dari pelayanan bidang Perhubungan berupa penyelenggaraan perhubungan yang mengembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menangani perhubungan. Adapun target dan realisasi pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.6**  
**Target dan Realisasi PAD Tahun 2017**

No	Uraian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Retribusi Pelayanan Parkir	70.000.000	39.766.000	56,81
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	165.000.000	161.881.000	98,11
3	Retribusi Terminal	70.000.000	72.254.000	103,22
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Pelayanan Kepelabuhan)	70.000.000	125.926.500	179,90
	<b>Jumlah</b>	375,000,000	399,827,500	106,62

Sumber : Dinas Perhubungan kab. Tanjab Barat, 2017

## 2.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan

### a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) dan Peraturan Bupati

Tanjung Jabung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 63)

Adapun uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategis dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dilingkungan dinas;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan penyebrangan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan unit pelayanan teknis dinas;
- e. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilingkup tugas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat mengacu Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 63); terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris :
  - Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perhubungan Darat;
  - Seksi Lalu Lintas Jalan dan Angkutan;
  - Seksi Sarana dan Prasarana;
  - Seksi Operasional dan Keselamatan;
4. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
  - Seksi Keselamatan Pelayaran;
  - Seksi Angkutan Kepelabuhan;
  - Seksi Sarana dan Prasarana;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Disamping itu, Dinas Perhubungan memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari UPTD Terminal, UPTD Pelabuhan Sungai, UPTD Parkir.

**b. Sumber Daya Aparatur**

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas PNS, TKS dan TKK yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) PNS dan 84 (delapan puluh empat) TKK.

Jika ditinjau dari kepegawaian dan tingkat tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.7**  
**SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**  
**Tahun 2017**

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :			
	- Eselon II	1	1	-
	- Eselon III	4	4	-
	- Eselon IV	14	11	3
	-Non Eselon	24	21	3
	Jumlah	43	37	6
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :			
	- SD	1	1	0
	- SMP	1	1	0
	- SMA	24	22	2
	- D II	1	1	0
	- D III	3	2	1
	- D IV	1	1	0
	- S.1	9	6	3
	- S.2	2	2	0
		Jumlah	43	39
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status :			
	- PNS	43	37	6
	- Kontrak	84	77	7
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur :			
	- Diklat PIM II	0	0	0
	- Diklat PIM III	1	1	0
	- Diklat PIM IV	6	6	0

### c. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam upaya mendukung pencapaian visi pemerintah kabupaten tanjung barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

#### **Visi :**

Visi OPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Sejalan dengan Visi Bupati Tanjung Jabung Barat, Visi Dinas Perhubungan adalah :

**“Terwujudnya transportasi antar MODA yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berbasis teknologi untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat”.**

#### **Misi :**

Misi adalah suatu pernyataan komprehensif tentang tugas pokok dan fungsi organisasi, serta sasaran yang hendak dicapai dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian misi sangat diperlukan dalam organisasi untuk mengarahkan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar setiap kegiatan/ produk organisasi selalu mengarah kepada pencapaian Visi.

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang terintegritas.

## 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan

sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Kemajuan di bidang Komunikasi dan Informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan perangkat komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam penempatan jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan informatika dapat menjangkau seluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah:

- a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjab Barat;
- b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;

Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:

1. Urusan Perhubungan
  - a. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;
  - b. Fasilitas pengatur dan pengamanan lalu lintas masih terbatas;
  - c. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
  - d. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
  - e. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah Kabupaten;
  - f. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
  - g. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang Perhubungan;
  - h. Belum meratanya sarana dan prasarana.

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk mewujudkan visi misi tersebut adalah :

- a. Adanya visi dan misi Dinas.
- b. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan Perhubungan.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
- d. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas.
- e. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait. Demi terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat maju, adil, makmur, bermartabat dan berkualitas sebagaimana tertera pada visi pemerintah kabupaten tahun 2016-2021. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada tahun 2017 mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya.
2. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ.
3. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan teknis, administrasi di bidang perhubungan.

## **2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019**

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman Perencanaan Pembangunan dengan membandingkan program dari pemerintah kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program untuk dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan kota.

Rancangan awal untuk RKPD Tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, Proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja daerah untuk 2019 sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah
2. Dukungan RPJMN 2016 – 2021 dan RKP 2018;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan ;

4. Bantuan dari Pemerintah Pusat Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
5. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
6. Pendukungan implementasi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Program/kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rancangan Awal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitive untuk diajukan menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja, Yang selanjutnya Menjadi Rancangan Rencana kerja yang dirumuskan dari usulan-usulan sebagai berikut :

1. Usulan Musrenbang dari kecamatan
2. Ide Kegiatan
3. Pokok-pokok Pikiran DPRD
4. Proposal yang disampaikan oleh Kecamatan Ke OPD terkait.

Yang selanjutnya Dinas Perhubungan akan menghimpun dan menelaah serta memproses setiap usulan-usulan yang disampaikan oleh Kecamatan untuk diproses dan dibahas dalam Rapat Forum OPD.

Rapat Forum OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan yang dihadiri oleh OPD terkait, Para Camat dan Bappeda yang hasil dari rapat Forum OPD adalah Review Rancangan Renja Dinas Perhubungan kabupaten Tanjung jabung Barat terhadap Usulan-Usulan dari setiap Kecamatan dapat terlihat pada table dibawah ini :



Berasal dari table diatas, dapat dilihat bahwa dari hasil review usulan dalam Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbeda dengan Rancangan Awal RENJA Sehingga terdapat Usulan baru dalam Perumusan Rancangan Rencana Kerja Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **2.6. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan**

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai Usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui Forum OPD akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Bidang Sarana Dan Prasarana Perhubungan. Pada umumnya kebutuhan masyarakat yang tertampung pada Musrenbang telah Ditelaah dan Diproses Oleh Dinas Perhubungan yang selanjutnya akan diproses kembali pada Forum Lalu lintas OPD. Beberapa Usulan yang telah diterima berupa :

1. Perencanaan Peningkatan Dermaga kayu Menjadi Halte Sungai
2. Pengadaan Marka / Rambu-rambu Jalan

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

---

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

##### a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan ke-unggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

##### b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas

perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan dan angkutan umum perkotaan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

**TABEL 3.1**

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

<b>VISI</b>	<b>MISI</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>“Terwujudnya transportasi antar MODA yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur</b>	<b>Misi 1</b> Penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan.	Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Transportasi darat
				Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Transportasi Sungai

<p><b>dasar berbasis teknologi untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat”.</b></p>				<p>Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Transportasi Pelabuhan Penyeberangan</p>
	<p><b>Misi 2</b> Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang terintegritas.</p>	<p>Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi</p>	<p>Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum</p>	<p>Persentase Kendaraan yang Laik Jalan</p>
			<p>Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut</p>	<p>Jumlah Kasus Kecelakaan Transportasi Darat</p>
				<p>Jumlah Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan</p>
	<p><b>Misi 3</b> Meningkatkan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Perhubungan yang berkompetensi dan professional.</p>	<p>Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berakhlak mulia.</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).</p>
<p>Nilai AKIP</p>				
<p>Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan</p>				

**TABEL 3.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RASIO	Kondisi Awal Tahun 2016	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Tertib Laik kendaraan angkutan umum	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	Rumus Indikator : $\frac{\text{Jumlah Kendaraan Yang Sudah Uji}}{\text{Jumlah Kendaraan Yang wajib Uji}} \times 100\%$	1154 Unit (85,4 %)	1170 Unit (86,6 %)	1188 Unit (88%)	1210 Unit (89,6%)	1300 Unit (96,2%)	1350 Unit (100%)	1350 Unit (100%)
2	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Air	Jumlah Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	Rumus Indikator : Total Kasus Kecelakaan tahun berjalan	50 Kasus	40 Kasus	30 Kasus	20 Kasus	10 Kasus	5 Kasus	0 Kasus
		Jumlah Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rumus Indikator : Total Kasus Kecelakaan tahun berjalan	5 Kasus	4 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	2 Kasus
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan	Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Terminal Pembengis	Rumus Indikator : $\frac{\text{Jumlah Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100\%$	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	100 %
		Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Rumus Indikator : $\frac{\text{Jumlah Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100\%$	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	100 %
		Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhan	Rumus Indikator : $\frac{\text{Jumlah Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100\%$	1 %	1 %	1 %	5 %	7 %	10 %	100 %

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 sebagai berikut:

#### 1. Urusan Perhubungan

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

##### **2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

##### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

**4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

1. Penyusun Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

**5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

1. Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

**6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ**

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan

**7. Program Peningkatan Pelayanan dan Angkutan**

1. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Dilingkungan Terminal Dan Parkir

2. Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai Dan Penyeberangan

3. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

4. Kegiatan Posko Pengamanan Hari – Hari Besar Nasional Dan Daerah

5. Kegiatan Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pelabuhan Sungai Dan Pelabuhan Penyeberangan

**8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**

1. Operasional Pengawasan Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

**9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Bermotor**

1. Uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a. Program Rutin terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 19 kegiatan.

b. Program Wajib terdiri dari, 4 program dengan total kegiatan 9 kegiatan.

Dapat di totalkan keseluruhan Setiap OPD terdiri dari program rutin dan program wajib adalah 9 program, terdiri 28 kegiatan.

### 3.4 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Tabel di bawah

**Tabel 3.1**  
**Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019**

No	Uraian	Target (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	
	Retribusi Parkir di tepi jalan	Rp. 90.000.000
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 150.000.000
2	Retribusi Jasa Usaha	
3	Retribusi Terminal	Rp. 80.000.000
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Rp. 100.000.000
	<b>Jumlah</b>	Rp. 420.000.000



**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 Perkiraan Maju 2020**  
**Setelah Rapat Forum Perangkat Daerah**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan maju rencana tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6
01 07	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>				<b>2.990.522.220</b>				<b>6.259.170.000</b>
	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>666.334.220</b>				<b>895.050.000</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishub	12 Bln	4.500.000	APBD Kabupaten		12 Bln	5.400.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dishub	12 Bln	136.000.000	APBD Kabupaten		12 Bln	335.000.000
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Dishub	12 Bln	61.500.000	APBD Kabupaten		12 Bln	58.000.000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dishub	12 Bln	118.580.000	APBD Kabupaten		12 Bln	125.000.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dishub	12 Bln	13.547.240	APBD Kabupaten		12 Bln	13.000.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dishub	12 Bln	49.845.780	APBD Kabupaten		12 Bln	55.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dishub	12 Bln	27.550.000	APBD Kabupaten		12 Bln	34.150.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dishub	12 Bln	4.611.200	APBD Kabupaten		12 Bln	5.500.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishub	12 Bln	6.000.000	APBD Kabupaten		12 Bln	7.500.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Dishub	12 Bln	4.200.000	APBD Kabupaten		12 Bln	6.500.000
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dishub	12 Bln	240.000.000	APBD Kabupaten		12 Bln	250.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	perkiraan maju rencana tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6
	<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>577.330.000</b>				<b>1.150.260.000</b>
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Dishub	0 Unit	-	APBD Kabupaten		0	-
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Terpenuhiya Perlengkapan Gedung Kantor Dishub	0 Unit	-	APBD Kabupaten		0	105.260.000
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan Gedung kantor Dishub	7 Unit	55.000.000	APBD Kabupaten		7	45.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Dishub	2 Unit	19.600.000	APBD Kabupaten		2	360.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Terpeliharanya gedung kantor Dishub	32 Unit	463.180.000	APBD Kabupaten		32	550.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung Kantor	Jumlah Terpeliharanya peralatan gedung kantor Dishub	54 Uniit	39.550.000	APBD Kabupaten		54	90.000.000
	<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>62.500.000</b>				<b>132.000.000</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas terpenuhi Dishub	125 Stel	62.500.000	APBD Kabupaten		125	132.000.000
	<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			-				<b>60.000</b>
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural Dishub	2 Stel	-	APBD Kabupaten		2 Orang	60.000
	<b>06</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>			<b>18.300.000</b>				<b>125.000.000</b>
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun Dishub	6 Dok	18.300.000	APBD Kabupaten		100%	125.000.000
	<b>05</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Prasarana dan fasilitas perhubungan</b>		-				<b>442.000.000</b>
		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	dokumen perencanaan pembangunan sarana dan Dishub	1 Dok	-	APBD Kabupaten		1 Dok	442.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	perkiraan maju rencana tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6
	06	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJSDP</b>	<b>Prasarana dan fasilitas LLAJSDP</b>			<b>58.768.000</b>			<b>450.000.000</b>
		Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Jumlah Terminal/Pelabuhan Dalam Kondisi Baik	Dishub	13 Unit	58.768.000	APBD Kabupaten	13 Unit	450.000.000
	07	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Kenyamanan masyarakat berlalu lintas</b>			<b>1.062.670.000</b>			<b>2.026.000.000</b>
		Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Terselenggaranta penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Dishub	2 Dok	530.280.000	APBD Kabupaten	2 Dok	790.000.000
		Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	Jumlah Dokumen Operasional yang tersusun	Dishub	2 Dok	188.700.000	APBD Kabupaten	2 Lok	306.000.000
		Sosialisasi penyuluhan lalu lintas angkutan sungai	Peningkatan pengetahuan lalu lintas angkutan sungai	Dishub	-	-	APBD Kabupaten	-	85.000.000
		Forum lalu lintas angkutan jalan	rapat-rapat pembahasan forum LLAJ	Dishub	4 Kali	13.200.000	APBD Kabupaten	4 Kali	250.000.000
		Kegiatan Posko pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	Terselenggaranya pelayanan posko ramadhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari besar nasional, hari besar keagamaan, hari besar daerah dan HUT perhubungan	Dishub	6 kali	175.000.000	APBD Kabupaten	6 Keg	200.000.000
		Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelabuhan yang tersusun	Dishub	2 Dok	155.490.000	APBD Kabupaten	2 Dok	265.000.000
		Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi awak/ kendaraan angkutan umum teladan	terpilih sopir/juru mudi awak/ kendaraan angkutan umum teladan	Dishub	1 Orang	-	APBD Kabupaten	1	45.000.000
		Sosialisasi penyuluhan lalu lintas angkutan darat	Peningkatan pengetahuan lalu lintas angkutan darat	Dishub	3 Kali	-	APBD Kabupaten	3	85.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	perkiraan maju rencana tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6
19	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>Penurunan angka kecelakaan lalu lintas</b>			<b>535.820.000</b>				<b>1.030.000.000</b>
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Darat	Rasio rambu terpasang pada titik rawan kecelakaan	Dishub		-	APBD Kabupaten			260.000.000
		- Rambu	unit	30 Unit	-	APBD Kabupaten		30	
		- RPPJ	unit	10 Unit	-	APBD Kabupaten		10	
		-guadrail	meter	140 Meter	-	APBD Kabupaten		140	
	Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah Frekuensi Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dishub	100%	535.820.000	APBD Kabupaten		100	770.000.000
08	<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>kelaikan kendaraan bermotor</b>			<b>8.800.000</b>				<b>8.800.000</b>
	Pengadaan Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedia alat pengujian kendaraan bermotor	unit	-	-			-	-
	Uji kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	- uji kelaikan kendaraan bermotor	unit		8.800.000	APBD Kabupaten			8.800.000
		- cetak buku uji	buku	2300 Buku				2300 Buku	
		- cetak plat uji/ penneng	pasang	2300 Pasang				2300 Pasang	
		- cetak stiker samping	pasang	2300 Pasang				2300 Pasang	
<b>TOTAL JUMLAH</b>					<b>2.990.522.220</b>				<b>6.259.170.000</b>

Kuala Tungkal, Juli 2019  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**

Pembina Utama muda  
NIP. 19650619 198512 1 001

**TABEL 3.3**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019**  
**SUMBER DANA APBN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**

<b>A. Usulan Kegiatan Peningkatan Dermaga ASDP, Halte Sungai dan Kelengkapan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan di Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019</b>		
NO	URAIAN	JUMLAH UNIT
1	Peningkatan Dermaga ASDP di Kuala Tungkal.	1 Unit
2	Perencanaan Pembangunan Halte Sungai di Dusun Kelagian Lama Desa Kelagian Kecamatan Tebing Tinggi.	1 Unit
3	Perencanaan Pembangunan Halte Sungai di Dusun Teluk Pengkah di Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi.	1 Unit
4	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai di Desa Parit Pudin Kecamatan Pengabuan.	1 Unit
5	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai Kelurahan Betara Kiri Kecamatan Kuala Betara.	1 Unit
6	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai di Kelurahan Tungkal V Kecamatan Seberang Kota.	1 Unit
7	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai Parit H. Yakub Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara.	1 Unit
8	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai Pasar Senin Desa Makmur Jaya Kecamatan Betara .	1 Unit
9	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai Desa Sungai Pampang Kecamatan Pengabuan.	1 Unit
10	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai di Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan.	1 Unit
11	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai di Desa Sungai Jering Kecamatan Pengabuan.	1 Unit
12	Perencanaan Peningkatan Dermaga Kayu Menjadi Halte Sungai di Desa Sungai Raya Kecamatan Pengabuan.	1 Unit
13	Jembatan Timbang di Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.	1 Unit
14	Daprah ( Protechor/Pelindung Ponton ) Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.	1 Unit
<b>B. MOHON USULAN BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN</b>		
NO	URAIAN	JUMLAH UNIT
1	Jalan Nasional dari Perbatasan Tanjung Jabung Barat - Tanjung Jabung Timur sampai ke simpang 3 BGP Pematang Lumut (data dukung terlampir).	323 Unit
2	Jalan Provinsi dari Simpang 3 Bram Itam sampai ke Kantor Camat Pengabuan Teluk Nilau (data dukung terlampir).	76 Unit
3	Jalan Provinsi dari Simpang 3 Parit Semau sampai ke Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal (data dukung terlampir).	-
4	Jalan Kabupaten dalam Kota Kuala Tungkal (data dukung terlampir).	132 Unit
5	Jalan menuju Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal (data dukung terlampir).	83 Unit
6	Kawasan dalam Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal ( data dukung terlampir).	55 Unit
7	Guardrail / Pagar Pengamanan Jalan (data dukung terlampir).	
8	Paku Jalan ( data dukung terlampir).	
9	Lampu Traffic Light sebanyak 2 (dua) Unit di Jalan Sriwijaya (simpang polwan) dan Jalan Siswa (simpang GOR).	2 Unit

## BAB IV KESIMPULAN

---

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan berdasarkan Renstra digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perhubungan. Renja Tahun 2019 ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Renstra.

Penyusunan Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta peran aktif stakeholder terkait.

Kuala Tungkal, 10 Juli 2019

Penanggung Jawab  
Dinas Perhubungan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650619 198512 1 001